

## ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Alfandy Ferry Igir<sup>1</sup>, Josep Bintang Kalangi<sup>2</sup>, George M.V.Kawung<sup>3</sup>

<sup>123</sup>*Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

*Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia*

*Email: [igiralfandy@yahoo.com](mailto:igiralfandy@yahoo.com)*

### ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan suatu daerah. Fungsi utamanya yaitu untuk memuaskan dan memenuhi kepentingan umum dan fungsi ini dicapai melalui program-program pemerintahan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan perkapita dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa runtun waktu (*time series*) yang diantaranya adalah data pendapatan asli daerah, pendapatan perkapita dan belanja daerah Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2007-2017. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan secara bersama-sama pendapatan perkapita dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

**Kata Kunci : PAD, Pendapatan Perkapita dan Belanja Daerah.**

### ABSTRACT

The original regional revenue (PAD) is one of the sources of receipt of an area. Its main function is to satisfy and meet the public interest and this function is accomplished through local governance programmes. The purpose of this research is to know the influence of income per capita and regional expenditures districts against the original regional revenue of South Minahasa Regency. This study uses secondary data in the form of time series, data such as the original regional revenue, income per capita and the regional expenditures South Minahasa Regency in the year 2007-2017. Analytical tools used in this study in this study is a multiple regression analysis model by the method of Ordinary Least Square (OLS). The research results showed that income per capita of influential positive and insignificant against the original regional revenue. Whereas, regional expenditures have a significant positive effect against the original regional revenue areas and per-capita income together and regional expenditures of positive and significant effect against the original regional revenue in the South Minahasa Regency.

**Keywords : PAD, Income Per Capita and Regional Expenditures.**

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Pembangunan nasional tentu mengarah pada pembangunan ekonomi khususnya yang ada di daerah. Pembangunan ekonomi daerah sendiri merupakan suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, Lincoln 2015).

Otonomi Daerah membuat peran serta pemerintah dan para pelaku ekonomi di daerah sangat penting adanya karena bisa menentukan pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah yang bersangkutan. Otonomi Daerah yang dilaksanakan per 1 Januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sangat erat kaitannya dengan sumber pendanaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Dengan sumber pendanaan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi lebih lancar.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian daerah yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Minahasa Selatan sangat mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan di daerah tersebut. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam hal ini memiliki peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah.

Pendapatan perkapita menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dimana semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah (Mardiasmo, 1995). Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu tetap, semakin tinggi pendapatan perkapita riil, semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin. Semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah membuat semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu. Angka pendapatan perkapita di suatu daerah dapat diperoleh dengan membagikan produk domestik regional bruto dengan jumlah penduduk, khususnya atas dasar harga konstan (ADHK) yang bisa menunjukkan hasil pendapatan perkapita riil masyarakat.

Belanja Daerah menjadi faktor yang juga di klaim mempengaruhi pendapatan asli daerah. Halim, Abdul (2001) mengatakan bahwa dalam penciptaan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja pembangunan yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah agar pada gilirannya dapat meningkatkan PAD.

Berbagai macam belanja yang dialokasikan oleh pemerintah baik untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan hendaknya manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar berbagai pungutan

yang ditetapkan pemerintah apabila layanan publik tidak cukup baik ataupun tidak mengalami peningkatan. Meningkatnya belanja atau pengeluaran pemerintah seperti pada pembiayaan infrastruktur dan berbagai sarana dan prasarana sangat penting guna meningkatkan perekonomian daerah yang bisa berdampak pada penerimaan daerah itu sendiri.

**Tabel 1 Pendapatan Perkapita, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2007-2017**

Tahun	Pendapatan Perkapita (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (%)
2007	5.942.924	415.270.985.098	5.567.377.399
2008	6.308.832	359.006.195.999	4.209.053.938
2009	6.693.952	385.500.408.342	6.598.234.717
2010	18.612.650	378.957.158.444	5.594.269.278
2011	19.129.650	483.672.278.567	9.407.280.004
2012	20.123.000	525.891.166.484	10.620.087.945
2013	21.261.650	561.242.693.084	14.406.092.809
2014	22.502.190	689.167.009.246	26.137.234.620
2015	23.716.600	880.310.568.457	32.567.773.521
2016	24.731.120	1.023.660.441.239	32.750.067.063
2017	26.180.000	944.871.604.830	50.660.513.502

Sumber : BPS dan BPKAD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2018

## Tinjauan Pustaka

### Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan. Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

### Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang merupakan penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan asli daerah merupakan jenis pendapatan

yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### Pendapatan Perkapita

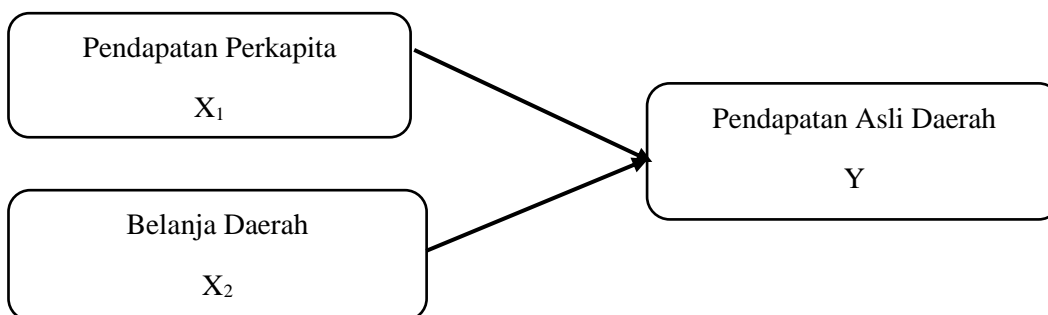
Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara: semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut. Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduknya. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Di suatu daerah bila Pendapatan Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu nilai yang disebut PDRB perkapita atau pendapatan regional perkapita yang merupakan pendapatan perkapita daerah.

### Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

### Kerangka Konseptual



Gambar 1 Skema Kerangka Konseptual

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka dan analisisnya menggunakan statistik. Metode kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di instansi yang terkait dengan penelitian ini yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Selatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Minahasa Selatan. Waktu penelitian di mulai pada pertengahan penyusunan penelitian ini, yaitu pada bulan April dan di lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya.

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data runtut waktu (*time series*) dengan runtut waktu selama 11 tahun yaitu data tahun 2007 sampai tahun 2017 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan cara mendatangi langsung instansi terkait untuk mengambil dan mengumpulkan data yang telah tersedia di instansi tersebut yang selanjutnya disusun dan diolah sesuai keperluan penelitian.

### Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah model regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (*ordinary least squares*). Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut:

$$Y = f ( X_1, X_2 ) \dots \dots \dots (1)$$

Dari bentuk fungsi diatas, maka dapat ditransformasi ke dalam bentuk Model Log-Log sebagai berikut:

$$\text{Ln}Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_2 + e \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>1</sub> = Pendapatan Perkapita

X<sub>2</sub> = Belanja Daerah

β<sub>0</sub> = Konstanta

β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub> = Koefisien Regresi Variabel Independen

e = Error Term

### Uji t

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen secara individual.

Pengujian dan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- Apabila nilai  $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$  maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, yang artinya variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Apabila nilai  $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$  maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak, yang artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## Uji F

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model dapat berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen.

Pengujian dan Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- Apabila nilai  $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Apabila nilai  $F_{hitung} < \text{nilai } F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Di gunakannya koefisien determinasi agar bisa mengukur seberapa baik garis regresi yang dimiliki dalam model regresi berganda ini. Dalam hal ini dengan mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-32.999	5.002		-6.597	.000
	LnPPERK	.163	.161	.112	1.009	.342
	LnBD	1.981	.247	.891	8.026	.000

a. Dependent Variable: LnPAD

Dari hasil pengujian regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y_{PAD} = -32,999 + 0,163 \text{ Pendapatan Perkapita} - 1,981 \text{ Belanja Daerah}$$

Berdasarkan hasil regresi dapat dijelaskan pengaruh variabel bebas yaitu Pendapatan Perkapita dan Belanja Daerah terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

- Nilai konstanta (Y) sebesar -32,999 yang berarti bahwa jika Pendapatan Perkapita dan Belanja Daerah sama dengan nol maka Pendapatan Asli Daerah bernilai -32,319.
- Pendapatan Perkapita berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi Pendapatan Perkapita sebesar 0,163 yang berarti setiap peningkatan Pendapatan Perkapita sebesar 1% maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 0,163%.
- Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi Belanja Daerah sebesar 1,981 yang berarti setiap peningkatan Belanja Daerah sebesar 1% maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,981%.

### Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah Pendapatan Perkapita dan Belanja Daerah masing-masing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan nilai t hitung (1,009) dan t table (1,859) yang didapat dari n-k atau 11-3 dengan  $\alpha=5\%$  serta dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian secara parsial variabel independent Pendapatan Perkapita terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah berdasarkan nilai t hitung dan t table (1,859) serta nilai probabilitasnya, menunjukkan nilai t hitung  $<$  t tabel yaitu  $1,009 < 1,859$  di tandai dengan nilai probabilitas sebesar 0,342 yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, ini artinya variabel Pendapatan Perkapita mempunyai pengaruh yang tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha=0,05$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Hasil pengujian secara parsial variabel independent Belanja Daerah terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah berdasarkan nilai t hitung dan t table (1,859) serta nilai probabilitasnya, menunjukkan nilai t hitung  $>$  t tabel yaitu  $8,026 > 1,859$  di tandai dengan nilai probabilitas 0,000 artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, ini artinya variabel Belanja Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha=0,05$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### Uji Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah Pendapatan Perkapita dan Belanja Daerah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan nilai F hitung sebesar 88,294 dan nilai F tabel sebesar 4,46 yang di dapatkan dari  $n-k= 11-3= 8$  dan  $k-1= 2$ , menunjukkan bahwa F hitung  $>$  F tabel atau  $88,294 > 4,46$  dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti secara simultan atau bersama-sama variabel independent Pendapatan Perkapita dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.978 <sup>a</sup>	.957	.946	.19958	2.352

a. Predictors: (Constant), LnBD, LnPPERK

b. Dependent Variable: LnPAD

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,957, ini menunjukkan persentase variabel Pendapatan Perkapita dan Belanja Daerah dalam menjelaskan variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 95% dan sisanya sebesar 5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

**Tabel 4 Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	LnPPERK	LnBD	LnPAD
Kolmogorov-Smirnov Z	1.145	.495	.519
Asymp. Sig. (2-tailed)	.145	.967	.950

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Nilai signifikansi dalam hal ini nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dari semua variabel lebih besar dari  $\alpha$  0,05 itu berarti semua data variabel terdistribusi normal.

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
LnPPERK	.439	2.277
LnBD	.439	2.277

Berdasarkan Tabel 5 di atas, maka dapat diketahui nilai Tolerance untuk Pendapatan Perkapita dan Belanja Daerah sebesar  $0,439 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $2,277 < 10$ , itu berarti regresi dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

**Uji Heterokedastisitas**

**Tabel 6 Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4.457	2.310		-1.930	.090		
	LnPPERK	-.070	.074	-.409	-.938	.376	.439	2.277
	LnBD	.213	.114	.814	1.866	.099	.439	2.277

- a. Dependent Variable: RES2



Dari output pada tabel 6 di atas, tampak kedua variabel yaitu Pendapatan Perkapita memiliki nilai signifikansi 0,376 dan Belanja Daerah 0,099 yang berarti tidak ada gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi kedua variabel lebih besar dari nilai 0,05.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi (Durbin Watson)**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.978 <sup>a</sup>	.957	.946	.19958	2.352

a. Predictors: (Constant), LnBD, LnPPERK

b. Dependent Variable: LnPAD

Dari hasil analisis data diperoleh nilai DW hitung (2,352) yang terletak diantara du (1,604) dan 4-du (2,396) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi deteksi autokorelasi.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan analisis yang dilakukan Pendapatan Perkapita memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, ini bisa dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,163 yang berarti apabila Pendapatan Perkapita mengalami kenaikan 1% maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 0,163%. Pendapatan seseorang yang semakin tinggi membuat kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah seperti pajak dan retribusi yang merupakan dua komponen dalam PAD juga semakin meningkat.

Namun hasil analisis juga menunjukkan tidak signifikannya pengaruh tersebut yang diduga disebabkan oleh pendapatan rata-rata penduduk setiap tahunnya tidak stabil atau tidak merata dengan kata lain terjadi kesenjangan/ketimpangan pendapatan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan kemampuan membayar kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah, baik dalam melakukan pembayaran pajak ataupun retribusi daerah yang merupakan dua penerimaan tertinggi dalam PAD diantara beberapa komponen penerimaan PAD lainnya di Kabupaten Minahasa Selatan.

#### Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, Belanja Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, nilai koefisien regresi sebesar 1,981 yang berarti apabila Belanja Daerah mengalami kenaikan 1% maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 1,981%.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja pembangunan yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah agar pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah

hal tersebut searah dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

### **Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian variabel secara simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Perkapita dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan. Artinya jika Pendapatan Perkapita dan Belanja Daerah mengalami peningkatan secara bersama-sama maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

## **4. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pendapatan Perkapita mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Belanja Daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Pendapatan Perkapita dan Belanja Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

### **Saran**

1. Secepatnya perlu dilakukan tindakan pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan rata-rata penduduk dan mengurangi kesenjangan atau ketidakmerataan pendapatan.
2. Upaya pemerintah untuk mengembangkan pendapatan daerah harus terus dilakukan dengan cara pengalokasian belanja yang tepat agar terus-menerus memberikan dampak yang baik bagi Penerimaan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Pemerintah perlu meningkatkan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan dengan mengalokasikan belanja modal atau belanja pembangunan yang lebih besar akan berdampak pada penerimaan daerah yang juga akan mengalami peningkatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, Lincolin. (2015).** *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN
- Badan Pusat Statistik, Minahasa Selatan Dalam Angka, 2008-2018.**
- Badrudin, Rudy. (2012).** *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Gujarati, Damodar. dan Dawn C. Porter. (2015).** *Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi Kelima, Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2001).** *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Lestari, Danise. 2016.** *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*. Conference on Management and Behavioral Studies. Universitas Tarumanagara. 642-651.

**Mardiasmo. (1995).** *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

**Mesra, B. 2017.** *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Manajemen Tools 8(2): 46-57.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004** Tentang Pemerintahan Daerah.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004** Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

**Widarjono, Agus. (2013).** *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.